



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 026/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 082/VI/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS  
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat  
Alamat : Jl. Palem 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna  
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Penghubung Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Tebet Timur Raya No. 51 – Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

      Telah mendengar keterangan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 082/VI/REG-KI-BANTEN/2012.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 9 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Penghubung Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;

4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kantor Penghubung Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/35 HMSP.PPID/2012 kepada Termohon perihal Permohonan Informasi, dalam rangka membantu Termohon untuk konsolidasi dan memfasilitasi agar Termohon memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon paling lambat 26 Maret 2012.

[2.4] Pada tanggal 20 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 430/7—HUB/III/2012 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten perihal Permintaan Informasi Publik dari Sdr. Muhammad HS yang pada intinya meminta perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Pemohon.

[2.5] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/4/-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang pada intinya PPID pada setiap SKPD memohon PPID Pemerintah Provinsi Banten mengajukan perpanjangan waktu kepada Pemohon selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.6] Pada tanggal 29 Maret 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 488/76-HUB/2012 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten untuk disampaikan kepada Pemohon perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi.

[2.7] Pada tanggal 2 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat melalui media elektronik Nomor 488/46-HMSP.PPID/2012 kepada Pemohon perihal Jawaban atas Permohonan Informasi .

[2.8] Pada tanggal 3 April 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat pada paragraf [2.7] kepada Pemohon melalui jasa pengiriman pos.

[2.9] Pada tanggal 9 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Provinsi Banten selaku atasan PPID Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon.

[2.10] Pada tanggal 20 April 2012, Termohon menyampaikan surat Nomor 488/93-HUB/2012 kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten selaku PPID Provinsi Banten, perihal Tindak Lanjut Keberatan atas Kesulitan Akses Informasi di Kantor Penghubung Provinsi Banten.

[2.11] Pada tanggal 22 Mei 2012, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor 488/61-HMSP/PPID/2012 kepada Pemohon, perihal Jawaban atas Keberatan.

[2.12] Pada tanggal 10 Agustus 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada tanggal 22 Juli 2012. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi dan menyatakan menarik diri;
2. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

### **Petitum**

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP;
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 2 Oktober 2012.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2012 Pemohon menyampaikan surat elektronik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten c.q. Panitera Komisi Informasi

Provinsi Banten perihal Alasan Ketidakhadiran Dalam Sidang Ajudikasi yang pada intinya menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk hadir mengikuti proses sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan Surat Panggilan.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 2 Oktober 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

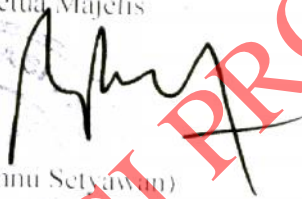
#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

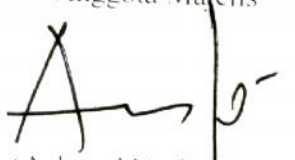
[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register Sengketa 082/VI/REG-KI-BANTEN/2012 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Reffiadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

  
(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Petugas Kepaniteraan

  
(Jeji Reffiadi)